

Buya Syafii Maarif: Muhammadiyah Memang Tak Dirancang untuk Mengurus Negara

Sabtu, 30-01-2016

Muhammadiyah berdiri sudah sejak 1912. Selama itu, Muhammadiyah selalu membantu bangsa ini, mulai sebelum merdeka hingga saat ini. Tapi masak mau jadi pembantu terus? Lalu kapan mau jadi penentu?. Untuk menjadi penentu, memang tak gampang. Perlu kerja keras dan proses panjang. Muhammadiyah memang tak dirancang untuk mengurus negara. Saya harap Jateng mulai berpikir ke arah sini. Sebenarnya tak apa Muhammadiyah hanya menjadi pembantu bangsa. Asal secara moral negeri ini semakin baik. Namun nyatanya, moral negeri ini semakin meluncur-meluncur dan meluncur. Siapkan Sosok Negarawan Namun begitu, Muhammadiyah tak boleh hanya diam melihat kemerosotan moral negeri ini, yang semakin menukik tajam. Kerusakan negeri ini sudah 50 persen, kita tak bisa berbuat apa-apa karena hanya pembantu. Kita harus bersiap menjadi penentu. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan diri menjadi penentu, kader Muhammadiyah harus rajin membaca, dan memerlukan banyak bacaan. Jangan alergi dengan berbagai macam bacaan. Jangan malas berpikir. Kalau ada setan karang buku, baca saja. Untuk menjadi negarawan, kader Muhammadiyah harus punya keahlian tertentu, berwawasan luas, dan bisa bergaul dengan siapa saja dan dari kalangan mana pun. Kita masih kesulitan menemukan sosok negarawan, Muhammadiyah harus mempersiapkan itu. Belajar dari Masyumi Muhammadiyah patut mengambil pelajaran saat terlibat dalam Partai Masyumi, terutama terkait berbagai masalah dalam mendirikan serta mengelola sebuah partai politik Islam. Muhammadiyah memiliki pengalaman yang tidak bahagia seperti saat bersama Partai Masyumi dan Parmusi. Mendirikan dan mengelola partai akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Untuk itu, saya harap Muhammadiyah tetap menjadi ormas keagamaan yang tidak terjun langsung ke kancah politik. Kader Muhammadiyah dapat masuk ke dunia politik secara individu. Alasannya, sudah saatnya bagi Muhammadiyah menjadi penentu kebijakan pemerintah lewat kadernya yang masuk ke birokrasi. Selama ini, lanjut dia, Muhammadiyah cenderung membantu negara dalam pemberdayaan masyarakat tapi belum dapat menjadi penentu utama kebijakan pemerintah. Syaratkan bagi kader Muhammadiyah yang ingin terjun ke dunia politik harus memiliki mental baja atau tahan banting terhadap berbagai tantangan dan problematika kebangsaan. Dengan kata lain, ada standar tinggi yang disyaratkan apabila seorang kader ingin terjun ke hingar bingar perpolitikan nasional. Satu hal yang tidak kalah penting, kader yang masuk ke perpolitikan harus sejahtera terlebih dahulu sebelum berpolitik praktis. Kalau mau masuk harus sudah mapan ekonominya terlebih dahulu agar tidak mementingkan diri sendiri untuk menjaga asap dapurnya tetap mengepul. - Tulisan ini adalah nukilan ceramah Prof. Dr. H. Syafi'i Ma'arif, MA, di Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dan Muktamar Muhammadiyah (Yayan Isro Roziki/tribun jateng/editor: Fakhrudin PWM Jateng)